



Bulletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Pokja SRG Sinergitas
Lintas Instansi**

**JFX Genjot Transaksi
Pasar Fisik Komoditi**

**Bappebti Tindak Tegas
Iklan Loker Penipuan**



Bursa Timah BKDI:

Guaranteed Supply & Guaranteed Quality

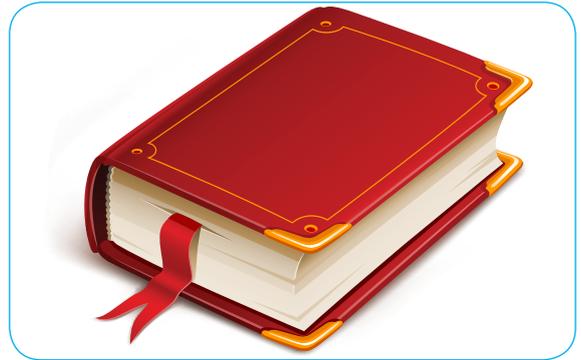


DAFTAR ISI

Berita Utama.....	4-7
- Bursa Timah BKDI: Guaranteed Supply & Guaranteed Quality	
Pasar Lelang.....	8-9
- PLKA Jateng, Diminati Pebisnis Agro	
Resi Gudang.....	10-11
- Pokja SRG Sinergitas Lintas Instansi	
Berjangka.....	12-13
- JFX Genjot Transaksi Pasar Fisik Komoditi	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita.....	16-17
- Bappebti Tindak Tegas Iklan Loker Penipuan	
- Pembelaan Wamendag Soal CPO di Eropa	
- Anggota Bursa Timah BKDI Tidak Terindikasi Ekspor Ilegal	
- Raker Kamendag 2014 Tingkatkan Kinerja Perdagangan Nasional	
Analisa.....	18
Breaking News.....	19
Info SRG.....	20-21

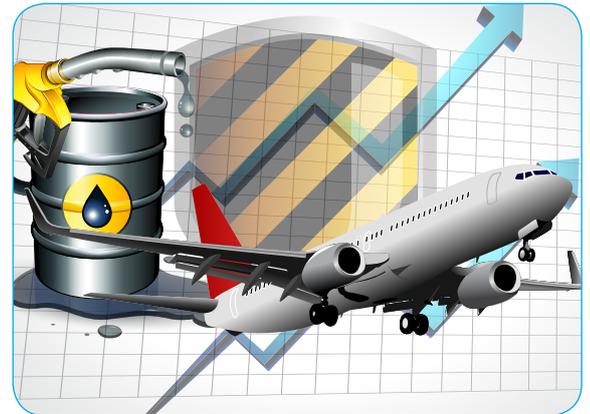
Forum...22-23

Peran Strategis Bappebti



Kolom...24-25

Manajemen Risiko Hedging BBM



Kiprah...26-27

Hetty Yohety
Kepincuk SRG Kopi



Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



buletin
Bappebti
BUKTIAN HARGA & PERDAGANGAN KOMODITI

Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab
Sutriyono Edi

Pemimpin Redaksi
Junaedi

Wakil Pemimpin Redaksi
Subagiyo

Dewan Redaksi
Natailus Nainggolan, Himawan Purwadi,
Widiastuti, Yuli Edi Subagio,
Yovian Andri, Tomi Setiawan,
Harry Prihatmoko, Poppy Juliyanti.

Sirkulasi
Apriliyanto,
Annisa Fitri Wulandari, Katimin.

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id



Foto : Kepala Bappebti, Sutriyono Edi berdialog dengan Dirut PT Food Station Tjipinang, Dwi Antono, yang berencana menjadi Pengelola Gudang SRG.

Indonesia Tin Conference & Exhibition (ITCE) 2014, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 10-12 Maret lalu, adalah pagelaran yang pertama kali diselenggarakan sepanjang sejarah Indonesia sebagai produsen dan eksportir timah terbesar di dunia. Di kesempatan langka itu, sejumlah *buyer* mancanegara tidak saja bertemu dengan para produsen atau penjual, mereka pun menyaksikan langsung proses produksi timah batangan di 'dapur' produsen timah.

Dari perhelatan itu, tampak ada secercah harapan Indonesia bakal menjadi pasar timah terbesar di dunia sekaligus sebagai produsen. Hal itu terlihat dari antusiasme para *buyer* mancanegara menggali informasi di 'lapak-lapak' *seller* timah.

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara perdagangan fisik timah di Indonesia, dengan menyelenggarakan acara tersebut pun menuai banyak masukan. Di antaranya, agar pertemuan semacam ITCE diselenggarakan secara reguler setiap tahun. Di sisi lain, BKDI juga diminta untuk menciptakan kontrak berjangka komoditi timah. Dengan harapan pasar timah di Indonesia semakin transparan dan likuid.

Bak gayung bersambut, melihat animo para peserta ITCE dan prospek perdagangan timah di Indonesia, BKDI pun berencana membentuk kawasan berikat timah di Jakarta.

Menurut Dirut BKDI, Megain Widjaja, dengan adanya kawasan berikat timah di Indonesia, akan meningkatkan likuiditas para pelaku timah. Karena di kawasan itu nantinya pihak *seller* pun bisa mengambil posisi sebagai *buyer* untuk perdagangan fisik tujuan ekspor. Dan yang pasti, di kawasan tersebut para pelaku tidak terbebani

pajak jual-beli.

Sementara itu, dari hasil evaluasi yang dilakukan Bappebti terhadap pasar fisik timah BKDI yang beroperasi pada 30 Agustus 2014, secara garis besar telah berhasil mengangkat harga timah Indonesia. Seperti dikatakan Sekretaris Bappebti, Junaedi pada pembukaan ITCE itu, 'naiknya harga timah ekspor Indonesia menunjukkan bahwa Bursa Timah BKDI sudah berhasil. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menjadikan bursa timah sebagai *price discovery* dan *price reference* juga ikut berhasil."

Dari data yang disodorkan, harga timah dalam enam bulan terakhir telah terangkat sebesar 11 % dengan rata-rata US\$ 23.170 per ton dibandingkan daripada perdagangan perdana sebesar US\$ 21.500 per ton.

Laporan lain yang disajikan Redaksi pada edisi ini yang tidak kalah penting adalah Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, mengingatkan kembali para kepala daerah agar lebih giat menggerakkan Kelompok Kerja Sistem Resi Gudang, atau juga dikenal dengan Pokja SRG. Gugusan tugas ini sudah dibentuk oleh Kementerian Perekonomian yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2009. Tujuan dibentuknya Pokja SRG tersebut untuk percepatan implementasi SRG di daerah dengan dukungan berbagai instansi yang ada.

Seperti dikatakan Kepala Bappebti Sutriyono Edi, pada acara sosialisasi SRG di Provinsi Lampung, 20 Maret lalu, "kepala daerah yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat terutamanya petani, sudah pasti SRG akan berjalan dan memberi manfaat bagi petani." Hal itu dikatakan karena dalam implementasi SRG diperlukan sinergi dan peran aktif seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, perbankan, asuransi, pengelola gudang, hingga kelompok-kelompok tani.



Bursa Timah BKDI:

Guaranteed Supply &



Sekretaris Bappebti, Junaedi mewakili kepala Bappebti Sutriyono Edi, memberikan sambutan dalam acara Indonesia Tin Conference & Exhibition (ITCE) 2014

BKDI berupaya menggaet calon buyer timah dari berbagai negara di Eropa, Amerika maupun Asia.

Bursa Timah BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia) pasca diluncurkan pada 30 Agustus 2013 lalu, telah menjadi fasilitas singgah untuk komoditi timah ekspor. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan No. 32 Tahun 2013, di mana Ekportir Terdaftar Timah (ET-Timah) diwajibkan untuk melakukan transaksi di Bursa Timah jika ingin melakukan ekspor.

Data BKDI mencatat, hingga Maret 2014 telah terdaftar 21 perusahaan pemegang ET-Timah yang bertindak

selaku penjual- *seller* dan 18 perusahaan dari luar negeri yang bertindak selaku pembeli- *buyer*.

Merujuk dari data pelaku Bursa Timah itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Sutriyono Edi mengatakan, perbandingan antara jumlah *seller* dengan *buyer* timah menjadi salah satu penentu tingginya likuiditas suatu bursa. "Dengan tingginya likuiditas suatu bursa, maka bursa akan efektif berfungsi sebagai sarana pembentukan harga. Dengan jumlah *buyer* timah yang



Guaranteed Quality



lebih banyak dibandingkan dengan *seller* akan membuat likuiditas Bursa Timah BKDI semakin baik," jelas Sutriyono Edi.

Terkait itu, BKDI selaku pengelola Bursa Timah untuk pertama kalinya menggelar Indonesia Tin Conference & Exhibition (ITCE) 2014, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 10-12 Maret 2014 lalu. Menurut Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, konferensi yang mengambil tema "guaranteed supply & guaranteed quality" itu, merupakan ajang mempertemukan antara *seller* dan

buyer timah dari mancanegara di sentra produksi timah Indonesia yakni di Provinsi Bangka Belitung.

"Pertemuan ini memiliki tujuan agar para pelaku usaha timah dan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) lebih mengenal dan memahami tentang Bursa Timah, siapa-siapa yang telah bertindak selaku *seller* ataupun *buyer*, bagaimana mekanisme transaksi perdagangannya, dan fasilitas apa saja yang disediakan oleh BKDI untuk memberikan kepuasan dan manfaat bagi semua pihak berkaitan," papar Megain dalam sambutannya di ITCE 2014.

Peserta yang hadir pada acara ITCE 2014, terang Megain, yakni anggota Bursa Timah BKDI yang bertindak selaku *seller* maupun *buyer*, dan juga calon *buyer* dari berbagai negara di Eropa, Amerika maupun Asia.

"Dengan pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesamaan arah dan langkah ke depan yang berkelanjutan dalam usaha pertimahan, pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan para penambang maupun masyarakat sekitarnya," harapnya.

Digelarnya acara ITCE 2014 itu juga mendapat apresiasi dari Kepala Bappebti, Sutriyono Edi. Dikatakan, dengan adanya konferensi ITCE 2014, diharapkan jumlah member *buyer* Bursa Timah BKDI dapat bertambah. "Kami harapkan selain dari *buyer* Asia, juga nantinya ada *buyer* yang berasal dari Eropa, Inggris dan negara lainnya."

Dalam rangkaian acara itu, BKDI juga mengajak sejumlah calon *buyer* dari perusahaan asing mengunjungi smelter yang ada di Bangka Belitung. Dengan kunjungan itu, calon *buyer* dapat melihat

langsung proses pemurnian timah di sejumlah produsen timah batangan yang sudah menjadi anggota Bursa Timah BKDI.

Evaluasi

Bappebti selaku otoritas pembina dan pengawas Bursa Timah telah melakukan evaluasi kinerja selama enam bulan beroperasinya bursa itu. Dari kesimpulan awal, jelas Sekretaris Bappebti, Junaedi, kinerja Bursa Timah BKDI sudah cukup memuaskan.

"Naiknya harga timah ekspor Indonesia menunjukkan bahwa Bursa Timah BKDI sudah berhasil. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menjadikan bursa timah sebagai *price discovery* dan *price reference* juga ikut berhasil," kata Junaedi.

Tapi, Bappebti masih akan melakukan evaluasi menyeluruh kinerja Bursa Timah BKDI. "Dengan adanya acara konferensi ITCE 2014 ini, nanti kita akan lihat sudah efektif belum keberadaan Bursa Timah BKDI," jelasnya.

Di sisi lain, tambah Junaedi, mekanisme transaksi perdagangan timah di BKDI sudah berjalan dengan baik. BKDI dengan slogan "*guaranteed supply & guaranteed quality*" telah menunjukkan kesungguhannya dalam menjalankan amanat Permendag No. 32 Tahun 2013, tentang ketentuan ekspor timah.

Dari data yang dirilis BKDI, volume transaksi Bursa Timah BKDI meningkat dari 159 lot (795 ton) pada bulan September 2013 terus beranjak naik sampai puncaknya pada bulan Desember 2013 sebanyak 1.649 lot (8.245 ton). Sementara itu pada bulan Januari dan Februari 2014 menurun ke kisaran 4.000 ton per bulan karena berbagai faktor.

Sampai awal Maret ini, total volume



Dirut BKDI, Megain Widjaja, memberikan sambutan dalam acara Indonesia Tin Conference & Exhibition (ITCE) 2014

perdagangan timah batangan di BKDI telah mencapai 5.405 lot (27.025 ton) dengan nilai US\$ 626,169,687. Harga rata-rata US\$ 23.170 per ton, atau naik hampir 11 % dalam 6 bulan terakhir ini bila dibandingkan dengan harga perdagangan perdana US\$ 21.500 per ton pada tanggal 30 Agustus 2013.

Pergerakan harga timah di Bursa Timah BKDI ini secara tidak langsung telah mempengaruhi harga timah di pasar internasional, di mana harga timah di LME (London Metal Exchange) pun beranjak naik ke kisaran US\$ 23.000 per ton, bahkan beberapa kali sempat melebihi harga di BKDI.

Megain berpendapat, secara umum dapat dikatakan telah sejalan dengan tujuan pembentukan Bursa Timah, yaitu untuk menjadi acuan harga timah internasional dan meningkatkan kontribusi pendapatan negara. Namun demikian, BKDI masih memandang kondisi saat ini belum menggambarkan mekanisme pasar yang sebenarnya.

"Kalau kita perhatikan pada bulan Januari dan Februari 2014, menurunnya volume transaksi di BKDI dan berkurangnya stok logam timah di LME ternyata tidak dapat mendongkrak harga timah di BKDI maupun LME. Dalam kondisi demikian tergambar adanya pemain-pemain antara yang berperan besar dalam perdagangan timah dunia," kata Megain.

Di sisi lain, Megain berharap, agar perdagangan timah di Bursa Timah ini dapat berlangsung sesuai mekanisme pasar, sehingga para produsen timah Indonesia yang bertindak sebagai *seller* di Bursa Timah BKDI dapat memperoleh harga yang wajar.

Artinya, bukan hanya sekedar menutup biaya produksi, tetapi juga mempunyai manfaat yang lebih besar untuk merehabilitasi lingkungan pertambangan, memperbaiki peralatan agar pekerja tambang dapat bekerja dengan aman serta bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

sekitar pertambangan pada umumnya.

"Di samping itu yang tidak kalah penting adalah agar para pelaku usaha pertambangan timah mampu memperluas wilayah eksplorasi, sehingga memberi jaminan keberlanjutan usaha pertambangan timah yang dibutuhkan oleh industri elektronika dan industri kimia lainnya," papar Megain Widjaja.

Kontrak Futures Timah

Calon *buyer* timah yang hadir dalam acara ITCE 2014 sangat mengharapkan adanya kontrak berjangka (*futures*) untuk komoditi timah di Bursa Timah BKDI. Hal itu diungkapkan beberapa calon *buyer* timah kepada Buletin Bappebti di sela-sela acara.

Sebut saja Mihail Manasov, Head of Trading, RJH Trading LTD., sebuah perusahaan pialang yang berbasis di London. Mihail mengatakan, BKDI sangat penting untuk meluncurkan kontrak berjangka timah agar para *buyer* timah dapat melakukan lindung nilai (*hedging*).



Mihail Manasov, Head of Trading, RJH Trading LTD.

"Karena itu, untuk saat ini kami baru melakukan *trading* di London Metal Exchange (LME) dan belum menjadi *member* di Bursa Timah BKDI," ungkapnya.

Tapi, kata Mihail, pihaknya memang cukup tertarik dengan keberadaan pasar fisik di Bursa Timah BKDI. "Sejak awal peluncuran Bursa Timah BKDI, kami selalu mengamatinya dan kami tertarik, meskipun kami masih harus berpikir lebih lanjut untuk menjadi *member*-nya."

Terkait perbedaan harga timah di Bursa Timah BKDI dengan LME, bagi Mihail, itu menjadi suatu hal wajar. "Ini merupakan market yang berbeda, antara pasar spot dengan futures," katanya.

Besarnya keinginan calon buyer untuk diluncurkannya kontrak berjangka timah juga diakui BKDI. "Sudah banyak *member* yang menanyakan kontrak futures timah. Karena mereka membutuhkan hedging (lindung nilai) lantaran sering bergejolaknya harga timah," ucap Megain Widjaja.

Tapi, kata Megain, untuk meluncurkan kontrak berjangka timah diperlukan seperangkat pemain-pemain yang berbeda jauh dari para pelaku timah. Misalnya, institusi keuangan dan institusi keuangan non-bank. "Untuk pasar fisik,

tidak diperlukan elektabilitas, tapi kalau futures itu harus. Jadi, kami masih butuh waktu untuk peluncuran futures komoditi timah dan yang terpenting pasar fisiknya saja yang lebih dahulu jalan," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Head of Market Control Center BKDI, Teddy Sangeroki. Menurutnya, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan jika BKDI akan meluncurkan kontrak futures timah. "Bagi kami, lebih baik terlambat, tapi yang kami berikan itu produk yang tepat. Karena kalau tergesa-gesa, akan berdampak kurang baik sedangkan pasar fisik timah saja baru berjalan enam bulan."

Untuk itu, BKDI akan terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam dan terperinci untuk meluncurkan kontrak timah tersebut. "Memang kajiannya sudah dimulai untuk saat ini. Tapi meskipun kajian itu nantinya sudah selesai, kami masih harus melihat lebih dahulu persyaratannya agar menjadi kontrak berjangka timah," papar Teddy.

Adapun Direktur PT Identrust Securitis International (ISI), Nursalam, mengatakan, lembaga kliring yang dipimpinnya ini sangat mendukung jika memang Bursa Timah BKDI akan meluncurkan kontrak berjangka timah. "Karena dengan adanya futures timah, maka manajemen *risk*-nya akan lebih mudah jika para member melakukan hedging," ujarnya.

Kawasan Berikat Timah

Melihat potensi bisnis setelah beroperasinya bursa timah sekitar enam bulan, BKDI juga sudah merencanakan membentuk kawasan berikat perdagangan fisik komoditi timah di Jakarta. Rencana beroperasinya kawasan berikat timah itu diperkirakan bisa terealisasi hingga akhir tahun 2013 ini. Dengan pembangunan kawasan itu, Megain Widjaja mengharapkan akan meningkatkan likuiditas para pelaku Bursa Timah BKDI.

"Saat ini para pelaku timah di BKDI baik itu seller maupun buyer, hanya melakukan perdagangan fisik untuk tujuan ekspor. Tetapi kami dalam waktu dekat ini akan membentuk kawasan berikat perdagangan komoditi timah. Dengan demikian para pelaku timah tidak terbebani pajak jual beli," jelasnya.

Dia menjelaskan, dengan adanya kawasan berikat timah tersebut, para pelaku tidak harus meyerahkan fisik timah. Tapi, cukup dengan dokumen kontrak timah yang telah diregistrasikan di bursa timah BKDI dan dijamin oleh lembaga kliring yakni PT ISI.

"Dengan kawasan berikat timah seperti itu, para pelaku akan bisa memperdagangkan paper (dokumen), sehingga dimungkinkan yang tadinya posisi sebagai seller bisa menjadi *buyer*," imbuh Megain Widjaja. **S**





PLKA Jateng

Diminati Pebisnis Agro



Mendag, M.Lutfi menjadi juru lelang pasar lelang komoditi agro Jateng.

Transaksi PLKA Jateng menembus Rp 11,08 miliar dan berhasil menjual komoditas dari limbah singkong.

Pelaksanaan Pasar Lelang Agro Komoditi (PLKA) Jawa Tengah ke-3 tahun 2014 tampak spesial. Pasalnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi turut hadir dan ikut meramaikan dengan menjadi pemandu lelang dalam gelaran acara tersebut. Mendag yang didampingi Bupati Temanggung, Bambang Sukarno dan Juru Lelang PLKA Jateng, Sugeng Wardoyo, berhasil membuat penjual dan pembeli antusias melakukan transaksi.

Kunjungan Mendag dalam pelaksanaan PLKA yang dilaksanakan di Pasar Temanggung Permai, Kabupaten Temanggung, 13 Maret 2014 lalu ini, dan berbarengan dengan peresmian pasar tersebut. Secara implisit, Mendag berharap agar kedepannya PLKA Jateng dapat mewujudkan PLKA berbasis *online*.

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Pantas Lumban Batu yang ikut mendampingi Mendag mengatakan, pasar lelang sebagai suatu kegiatan bisnis memang sudah selayaknya didukung oleh penggunaan teknologi dengan mengembangkan situs pasar lelang. Melalui dukungan teknologi maka kegiatan pasar lelang dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

"Melalui penggunaan situs, maka penyelenggaraan pasar lelang sudah tidak mengenal batas wilayah karena dapat menjangkau seluruh Indonesia bahkan internasional. Dengan itu, maka para petani dan pelaku usaha dapat melakukan transaksi lelang tanpa harus datang ke lokasi pasar lelang," terang Pantas kepada Buletin Bappebti.

Bukukan Rp 11,08 miliar

Penyelenggaraan PLKA Jateng kali ini berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 11,08 miliar, dengan lima komoditi terbesar yakni beras, gula pasir, jagung, cabe merah, dan jengkol.

Juru Lelang Jateng, Sugeng Wardoyo mengatakan, PLKA Jateng memang sangat diminati masyarakat pelaku bisnis agro. Hal itu dibuktikan saat pasar lelang dibuka dalam waktu 40 menit, nilai transaksi sudah melesat hingga mencapai Rp 2,38 miliar.

Dalam pelaksanaannya PLKA Jateng menggunakan bentuk penyerahan kemudian (*forward*), di mana penjual dengan pembeli bertemu namun tidak memberikan barang pada hari itu, tapi hanya dalam bentuk kontrak kerjasama



kedua belah pihak.

Menurutnya, kegiatan itu dilakukan untuk mengakomodir penjualan hasil pertanian unggulan khususnya di Jawa Tengah. Dengan pasar lelang transaksi lebih cepat, praktis, aman dan mudah. Selain itu, penyelenggaraan pasar lelang mempunyai tujuan untuk memperpendek mata rantai perdagangan dengan mempertemukan para pelaku usaha (penjual/pembeli) secara langsung, transparan, adil dan wajar sehingga terbentuk harga (*price discovery*), dan komoditas yang dijadikan sebagai harga acuan (*price reference*) dalam perdagangan.

"Lelang ini untuk berbagai komoditas pertanian seperti gula, kelapa, jagung, singkong basah, singkong kering, dan kulit ubi kayu kering serta kulit singkong atau limbah singkong," paparnya.

Untuk komoditas dari limbah singkong, seperti kulit ubi kayu kering dan kulit singkong kering menjadi komoditas baru dalam PLKA Jateng ke-3 tahun ini. Sebab, sebelumnya limbah singkong tidak dimanfaatkan. "Tapi, setelah diketahui ada nilai ekonomisnya, maka sekarang kulit ubi kayu kering dan kulit singkong kering justru diminati pasar," ujar Sugeng.



Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Pantas Lumban Batu (kanan) mendampingi Mendag M.Lutfi saat meninjau back office pasar lelang Jateng.

Data Transaksi PLKA Jateng ke-3 Tahun 2014 (Transaksi 5 Besar)

TANGGAL LELANG	KOMODITI	JENIS	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	GUDANG SERAH
13 Maret 2014	GULA PASIR	Putih	Rp. 9.450,-/kg	Rp. 9.450,-/kg	Jakarta Timur
	BERAS	Medium.	Rp. 6.000,-/kg	Rp. 6.000,-/kg	Semarang
		Medium..	Rp. 8.500,-/kg	Rp. 8.500,-/kg	Jakarta
		IR 64 Medium	Rp. 8.300,-/kg	Rp. 8.300,-/kg	Bandung
		Medium	Rp. 6.250,-/kg	Rp. 6.250,-/kg	Banjarnegara
		IR 64 Slip	Rp. 8.700,-/kg	Rp. 8.700,-/kg	Jakarta
		Segon Bandung	Rp. 9.400,-/kg	Rp. 9.400,-/kg	Jakarta
	JAGUNG	Hibrida	Rp. 2.800,-/kg	Rp. 2.800,-/kg	Pekalongan
		Pipilan kering	Rp. 3.000,-/kg	Rp. 3.000,-/kg	Surakarta
		Instant nasi	Rp. 11.000,-/kg	Rp. 11.000,-/kg	Purworejo
	JENGKOL	Lokal	Rp. 14.000,-/kg	Rp. 14.000,-/kg	Jakarta Timur
	CABE	Merah tm 99	Rp. 13.250,-/kg	Rp. 13.250,-/kg	Jakarta Timur



Eksistensi Pokja SRG yang ada di daerah membuktikan tingkat keberhasilan implementasi SRG dan berpihak pada kepentingan masyarakat petani.



Kepala Bappebti, Sutriyono Edi

Pokja SRG Sinergitas Lintas

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, menilai implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) diperlukan sinergi dan peran aktif dari banyak pihak terutama pemerintah daerah. Bila masing-masing pihak terkait bergerak sesuai kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki untuk kepentingan petani, SRG akan lebih cepat bisa diterima dan berkembang di daerah.

Upaya pemerintah mempercepat implementasi SRG di tingkat pusat hingga daerah sejak tahun 2009 telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) SRG. Pokja SRG di tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian sedangkan di daerah berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi.

Namun karena Pokja SRG itu bersifat koordinasi, pemerintah

daerah cenderung kurang bergairah menggerakkan SRG. Sedangkan daerah yang aktif melakukan koordinasi terbukti bisa mengimplementasikan SRG dan memberi berbagai manfaat bagi petani.

Demikian antara lain diungkapkan Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, pada sosialisasi SRG di Provinsi Lampung, 20 Maret 2014. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung, Choiriah Pandarita, Guru Besar Univ. Lampung, Bustanul Arifin yang juga sebagai narasumber dan perwakilan PT Pertani (Persero), perwakilan BRI, serta Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Pantas Lumban Batu.

"Pengembangan dan percepatan pelaksanaan SRG diperlukan sinergi dan peran aktif seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, perbankan, asuransi, pengelola gudang, hingga kelompok-

kelompok tani," kata Sutriyono Edi.

Untuk percepatan pelaksanaan SRG tersebut, tambah Sutriyono Edi, pemerintah pusat di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri telah membentuk Pokja SRG. "Dibentuknya Pokja SRG ini agar terjalin sinergita antara institusi, sehingga implementasi SRG segera terlaksana di daerah."

"Sebab itu dalam kesempatan ini saya menggugah kembali agar Pokja SRG terutama yang ada di Provinsi Lampung bisa bergerak lebih cepat. Terlebih lagi di tahun 2014 ini, Provinsi Lampung akan memperoleh gudang dari pemerintah pusat. Dengan bantuan pembangunan gudang itu, Lampung akan memiliki enam gudang SRG," katanya.

Lebih jauh dikatakan Sutriyono Edi, bantuan pembangunan gudang SRG dari



Instansi

pemerintah pusat pada dasarnya hanya sebagai stimulus untuk menampung hasil produksi petani. Sejatinnya yang diharapkan pemerintah pusat, Pemda berperan aktif memaksimalkan gudang-gudang milik swasta, BUMN atau pun koperasi. Karena kalau hanya mengandalkan gudang SRG yang dibangun pemerintah pusat pastinya tidak mencukupi menampung hasil produksi petani. Sebab kapasitas gudang yang dibangun hanya berkisar 2.500 ton. "Jadi di sinilah antara lain peran Pokja SRG yang ada di daerah untuk mencari gudang yang sudah ada dan dijadikan gudang penyimpanan komoditi."

"Kami sangat mengharapkan Pemprov Lampung bisa lebih kencang lagi menggerakkan SRG. Sebab provinsi ini memiliki beragam komoditi yang berpotensi dimasukkan dalam skema SRG.

Selama ini kita sudah mengenal Lampung sebagai sentra komoditi kopi, beras, lada, coklat, gula dan jagung. Dan semua komoditi itu bisa dimasukkan ke gudang SRG," ujar Sutriono Edi.

Terbukti

Pengalaman dari daerah lain yang sudah berhasil mengimplementasi SRG terbukti memberi manfaat besar bagi petani. Dan tanpa diarahkan, ketika harga jual komoditi rendah, petani menggunakan gudang SRG sebagai tempat penyimpanan komoditi hingga harga jual komoditi tersebut memberi keuntungan bagi petani.

"Kab. Cianjur merupakan salah satu Pemda yang cukup berhasil mengimplementasikan SRG. Hampir sepanjang waktu gudang SRG Cianjur tidak pernah kosong. Bahkan dari laporan yang kami terima, Pengelola Gudang kewalahan untuk menerima komoditi gabah petani di saat masa panen," ungkap Sutriono Edi.

Ditegaskan Sutriono Edi, keberhasilan SRG di Kab. Cianjur dikarenakan terjalannya sinergitas antar instansi. Masing-masing instansi berperan sesuai kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki. Misalnya, dinas pertanian aktif melakukan penyuluhan sehingga hasil panen petani menjadi lebih banyak. Demikian juga dinas koperasi, membina para petani agar berkelompok membentuk koperasi petani.

"Jadi kalau pemimpin daerah berpihak kepada kepentingan masyarakatnya, sudah pasti SRG akan berjalan dan memberi manfaat bagi petani," tegas Sutriono Edi.

Di bagian lain dari sosialisasi SRG tersebut, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Pantas Lumbn Batu, mengatakan, Bappebti telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sejak tahun 2009 untuk mengimplementasikan SRG. Hingga tahun 2013 lalu, pemerintah telah membangun gudang sebanyak 98 gudang SRG di 78 kabupaten di 21 provinsi.

"Khusus di Provinsi Lampung telah dibangun sebanyak 6 gudang SRG yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, dan Pesisir Barat. Rencananya pada tahun 2014 akan dibangun kembali sebanyak 1 gudang SRG di Provinsi Lampung, yaitu di Kabupaten Lampung Selatan," kata Pantas.

Pembangunan gudang SRG merupakan komitmen pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan untuk membantu menghidupkan perekonomian daerah, mendorong tumbuhnya pelaku usaha di daerah dan sebagai sarana pengendalian stok nasional yang lebih efisien. "Oleh karena itu, kami juga meminta pemerintah daerah untuk terus berkomitmen dalam mendukung implementasi SRG di Provinsi Lampung," tambahnya.

Dengan memiliki resi gudang, para pelaku usaha, khususnya petani, kelompok tani, koperasi, dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memperoleh kredit di bank tanpa memberikan jaminan atau aset tetap lainnya, seperti tanah, rumah, atau kendaraan bermotor. "Jaminannya adalah resi gudang itu sendiri yang merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, sehingga petani tidak perlu menjual hasil panennya langsung pada saat panen raya di mana harga sedang turun," jelas Pantas.

Pembiayaan resi gudang, kata Sutriono, telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, BPRS, Bina Amanah Satria Purwokerto, maupun lembaga keuangan non-bank, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (KUKM). Nilai total pembiayaan yang telah diberikan sampai 17 Maret 2014 sebesar Rp 164,09 miliar.



JFX Genjot Transaksi Pasar Fisik Komoditi

Untuk dapat lebih mendongkrak transaksi multilateral, beberapa langkah strategis akan dilakukan JFX pada tahun ini.



Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo

Volume transaksi perdagangan komoditi primer atau dikenal juga multilateral di Jakarta Futures Exchange (JFX) selama triwulan I-2014 tercatat sebesar 89.125 lot. Volume transaksi ini membukukan kenaikan sebesar 45 % dibanding periode yang sama tahun 2013 lalu yakni sebesar 61.336 lot.

Menurut Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, lonjakan transaksi ini terutama disebabkan oleh moncernya transaksi kontrak berjangka kopi. Dan saat ini, kontrak kopi menjadi primadona baru di JFX.

Pasca peluncuran kontrak berjangka kopi arabika dan robusta pada Desember 2013 lalu, kedua produk tersebut mencatatkan volume transaksi yang

cukup cemerlang. Total volume transaksi kontrak arabika dari Januari hingga Maret 2014 sebesar 15.698 lot dan kontrak robusta mencapai 22.668 lot.

"Kami sangat senang kontrak kopi yang baru diluncurkan Desember lalu mendapat respon yang sangat positif dari pasar. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kontrak kopi ini melalui JFX," kata Bihar, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Data JFX mencatatkan, volume transaksi kontrak kopi arabika berturut-turut dari Januari hingga awal Maret 2014 mencatat volume transaksi masing-masing sebesar 4.590 lot, 7.050 lot, dan 4.058 lot. Kopi robusta pun tak kalah banyak peminatnya, bahkan mencapai 4.900 lot, 7.710 lot, dan 10.058 lot selama

tiga bulan pertama.

Bihar menjelaskan, nilai per poin kontrak kopi arabika adalah Rp50/kg dengan bulan kontrak Maret, Mei, Juli, September, dan Desember. Sedangkan untuk kopi robusta, satuan kontraknya adalah 5 ton (5000 kg), dengan kualitas SNI Grade IV-B Robusta Coffee (No. 01-2907-2008) sesuai dengan ketentuan Badan Standardisasi Nasional. Nilai per poin untuk kontrak kopi robusta adalah Rp10 per kg, dengan bulan kontrak Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November.

Kontribusi komoditi selanjutnya, sambung Bihar, berasal dari kakao dengan jumlah volume transaksi kuartal I-2014 mencapai 12.892 lot, atau mengalami kenaikan 11% dibanding periode tahun lalu yang sebesar 11.644 lot. Rinciannya, volume transaksi kakao bulan Januari sebesar 4.220 lot, Februari 4.513 lot, dan Maret 4.159 lot.

Sementara itu untuk Kontrak Olein, Berjangka Emas, Gulir Indeks Emas, Gulir Emas, dan Berkala Emas terus dipacu agar volume transaksi terus meningkat. Sepanjang kuartal I-2014, Bihar mengakui, transaksi kontrak-kontrak tersebut mengalami penurunan. "Beragam bentuk sosialisasi dan edukasi terus dilakukan sebagai stimulus guna meningkatkan volume transaksi di JFX," katanya.

Konsultan Ethiopia

JFX mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari pertemuan Association of Futures Markets (AFM) ke-17 di



Nusa Dua, Bali pada 23-25 Februari 2014 lalu. Bihar mengatakan, pertemuan tersebut membuat JFX berkeinginan untuk mendatangkan konsultan bursa dari Ethiopia. Dan, dengan kehadiran konsultan itu, JFX diharapkan dapat menjadi bursa komoditi andalan di Indonesia.

Pernyataan Bihar itu memang cukup menggelitik. Pasalnya, jika dibandingkan dengan Indonesia, maka Ethiopia masih menjadi negara terbelakang di Benua Afrika. Tapi, Bihar memiliki alasan yang cukup kuat untuk hal itu.

"Kita tidak usah melihat bursa di negara yang sudah maju, karena memang bursa mereka sudah sepatasnya telah berkembang setelah beroperasi puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Sekarang kita belajar kepada negara yang masih terbelakang, bursanya seperti apa sih? Dan ternyata, bursa di Ethiopia itu cukup berkembang dengan baik," ungkapnya.

Menurut dia, bursa di negara maju, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, memang sudah lumrah jika memiliki kelebihan dibandingkan dengan bursa di negara lainnya. "Bursa di negara maju didukung regulasi, teknologi dan finansial yang jauh berbeda dari negara kita," imbuhnya.

Untuk itu, JFX lebih memilih untuk belajar dari bursa-bursa di negara yang terbelakang namun bursa komoditinya mampu berjalan dengan baik. "Tidak hanya Ethiopia, bursa di Belarusia ternyata juga mampu berjalan dengan baik. Pasar fisik di bursa dua negara itu cukup hebat, dan kami sangat tertarik untuk menggali pengalaman mereka," kata Bihar.

Bursa komoditi harusnya tidak selalu identik dengan kontrak futures (perdagangan berjangka komoditi-PBK). Tapi bisa dimulai dari pasar fisik, kemudian menuju ke futures. "Dan mereka (Ethiopia dan Belarusia) ternyata bisa, 'lho," ucap Bihar.

Tidak kalah penting, Bihar menegaskan, kunci keberhasilan sebuah bursa komoditi terletak pada kebijakan pemerintahnya. "Ketika kita ngobrol

dengan mereka (Ethiopia dan Belarusia), kunci keberhasilannya terletak pada government," tegas Bihar.

Pasar Fisik Batubara

Untuk meningkatkan transaksi multilateral, JFX berencana meluncurkan pasar fisik batubara pada tahun ini. Menurut Bihar, rencana awal pasar fisik batubara JFX akan diperdagangkan secara perdana pada bulan Maret 2014. Tapi, karena proses perizinan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) belum tuntas, maka rencana tersebut masih tertunda.

"Sebenarnya kami sudah siap melakukan perdagangan perdana batubara pada bulan Maret 2014 ini. Namun karena proses perizinan yang belum selesai dari Bappebti, maka rencana perdagangan perdana tersebut terpaksa diundur," jelasnya

Semula, terang dia, sudah ada kesepakatan antara Bappebti, JFX dan para perusahaan penjual (*seller*) batubara di dalam negeri untuk melakukan perdana pada bulan Maret 2014 ini. Hal itu dilandasi siklus tahunan para pelaku batubara melakukan kontrak jual-beli yang umumnya pada bulan Februari hingga April. "Tapi pada dasarnya momentum siklus tahunan itu masih dapat kita kejar di bulan berikutnya."

Saat ini sudah ada sebanyak 25 perusahaan yang siap menjadi anggota pasar fisik batubara JFX. Di antaranya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Bukit Asam (Persero), dan lainnya. "PT PLN nantinya akan menjadi salah satu *buyer* terbesar di JFX. Selain itu juga ada sejumlah perusahaan dari berbagai kalangan industri di dalam negeri," ujarnya.

Bihar juga memastikan bahwa peluncuran pasar fisik batubara di JFX akan tetap dilaksanakan pada tahun ini, meskipun untuk waktunya masih tentatif.

Mandek

Pasar fisik karet di JFX diakui Bihar tidak dapat berjalan mulus. Pasar fisik karet ini untuk sementara belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. "Sudah ada beberapa kali lelang diselenggarakan, tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Jadi untuk sementara, kami hentikan dulu," katanya.

Sekedar mengingatkan, pada 20 Desember 2013 lalu, JFX telah meluncurkan pasar fisik karet dengan satuan kontrak 5 ton (5.000/kg) dan perubahan harga minimum Rp 10/kg. Jenis penyerahan pasar fisik karet adalah Loco Gudang Penjual atau Franco Gudang Pembeli. Adapun mutu karet yang diperdagangkan yakni Bokar dengan kadar karet kering (K3) minimal 50 %.

Menurut Bihar, dalam pelaksanaan pasar fisik karet ini, pihaknya masih susah untuk dapat menyisir petani karet Bokar (bahan olahan karet rakyat). "Mereka (petani karet) itu biasa lelang konvensional, disuruh yang agak canggih agak susah," jelasnya.

Memang sebelumnya, beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) karet sudah mau mengikuti lelang pasar fisik karet di JFX. Tapi, Gapoktan tersebut kurang tertarik dengan prosedur yang telah ditetapkan. "Mereka maunya serba instan, mudah dan ingin cepat memperoleh uang," jelasnya.

Di sisi lain, Bihar mengakui, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) belum mau bekerjasama dengan JFX. "Gapkindo tidak mau kita ajak jalan bareng."

Meski untuk sementara pasar fisik karet di JFX terhenti, Bihar menjelaskan, sosialisasi dan edukasi masih terus dilakukan dan ditingkatkan. "Kami sudah membentuk tim sosialisasi dan edukasi. Meskipun itu bukan fungsi bursa, tapi ini menjadi proyek percontohan," tandas Bihar Sakti Wibowo. 



Agenda Foto



Rapat Kerja Kemendag Tahun 2014

Mendag Muhammad Lutfi bersama Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Wamendag Bayu Krisnamurthi menghadiri pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2014 yang berlangsung tanggal 11-14 Maret di Hotel Borobudur. Rapat ini mengusung tema Implementasi Undang-undang Perdagangan Untuk Mendukung Stabilisasi Harga, Peningkatan Ekspor, Diplomasi Perdagangan dan Kebijakan Strategis Perdagangan.

"Rapat kerja Kemendag 2014 memiliki arti strategis bagi kesiapan sektor perdagangan Indonesia menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam perkembangan perekonomian dunia

yang sangat cepat. Raker ini membahas beberapa isu-isu penting, seperti perhatian terhadap peningkatan ekspor stabilisasi harga bahan pokok, konsumen cerdas, diplomasi perdagangan internasional, serta kesiapan Indonesia menuju implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015," jelas Mendag Lutfi pada saat menyampaikan sambutannya.

Pada Raker ini, Mendag juga mengajak peran serta stakeholder untuk memikirkan bersama bagaimana strategi Kemendag kedepan dalam meningkatkan ekspor produk yang bernilai tambah. Artinya proses transformasi industrialisasi secara gradual ke arah industri berbasis nilai tambah tinggi menjadi prioritas.



Wamendag Dialog Soal Sustainable Palm Oil di Parlemen Eropa

Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi didampingi wakil dari Indonesia Palm Oil Customer Care dan petani dari Aceh dan Sumatera Utara, melakukan dialog dengan industri kelapa sawit di Uni Eropa (UE) dan debat di Parlemen Eropa mengenai minyak sawit berkelanjutan (sustainable palm oil) pada kunjungan kerja dua hari, 17-18 Maret 2014 di Brussel, Belgia.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendag menegaskan bahwa minyak sawit adalah komoditas utama dan penting bagi perekonomian Indonesia. Wamendag juga menyampaikan kembali keseriusan dan komitmen penuh Pemerintah RI dalam menerapkan sustainable palm oil di Indonesia.

Lebih lanjut, Wamendag mengatakan, "Indonesia sudah memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yaitu suatu peraturan pemerintah yang wajib diberlakukan kepada industri dan petani sawit agar memproduksi minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan melalui penerapan sertifikasi."



Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka

Kepala Bagian Humas dan Kerjasama, Subagiyo, membuka sekaligus memberikan pengarahan pada acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka di Surabaya, 5-6 Maret 2014. Dalam pengarahannya, dia mengatakan peran Wakil Pialang Berjangka sangat strategis dalam pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi, karena wakil pialang berjangka merupakan ujung tombak dalam menghadapi nasabah.

Acara itu juga dihadiri Sekretaris Bappebti, Junaedi. Adapun peserta yang mengikuti ujian profesi tersebut berjumlah 138 orang yang berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Peserta yang lulus ujian tertulis pada hari pertama berjumlah 111 orang dan berhak untuk mengikuti ujian wawancara pada hari kedua.



Pelatihan Pemandu dan Operator Pasar Lelang

Bappebti menyelenggarakan Pelatihan Operator dan Pemandu Lelang di Hotel Cemara, di Jakarta, 24 s.d 26 Maret 2014. Tujuan acara itu yakni untuk membentuk tenaga calon penyelenggara revitalisasi Pasar Lelang Komoditas Agro (PLKA) yang terampil.

Acara pelatihan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Pantas Lumban Batu, mewakili Kepala Bappebti. Acara ini diikuti oleh 26 peserta calon Operator Lelang dan Pemandu Lelang dari calon Revitalisasi Penyelenggara Pasar Lelang yang ada di 13 propinsi penyelenggara PLKA di Indonesia.

Pada pelatihan ini, mereka diberikan materi bagaimana membangun komunikasi yang efektif, keterampilan mengenai pengoperasian aplikasi pasar lelang dan kemampuan memandu jalannya pasar lelang agar berjalan aktif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.



Bappebti Tindak Tegas Iklan Loker Penipuan



Bappebti per 21 Maret 2014 lalu, menerbitkan Surat Edaran No. 42/BAPPEBTI/SE/03/2014 tentang Larangan Bagi Pialang Berjangka untuk Mencari Calon Nasabah atau Nasabah dengan Dalih Iklan Lowongan Pekerjaan. Terbitnya surat edaran itu merupakan penegakan hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan untuk mengurangi maraknya kasus yang berkaitan dengan penerimaan calon nasabah atau nasabah Pialang Berjangka

melalui iklan lowongan pekerjaan di berbagai media cetak maupun elektronik.

Berikut sejumlah materi muatan dalam Surat Edaran No. 42 Tahun 2014:

a. Pialang Berjangka dilarang memuat atau menyebarkan di berbagai media baik media cetak yakni koran, dan elektronik yakni melalui situs jual-beli, sosial media, dan/atau situs-situs internet lain yang pada intinya melakukan penawaran lowongan pekerjaan untuk kemudian diarahkan menjadi calon nasabah atau

nasabah.

b. Pialang Berjangka dalam melakukan penawaran lowongan pekerjaan, dilarang untuk menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu, yang tidak sesuai dengan fakta, atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat.

c. Pialang Berjangka bertanggung jawab terhadap kebenaran isi materi iklan terkait lowongan pekerjaan yang disebarkan kepada masyarakat baik media cetak yakni koran dan elektronik yakni melalui situs jual-beli, sosial media, dan situs-situs internet lain.

d. Pialang Berjangka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas terkait larangan mencari calon nasabah atau nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pembelaan Wamendag Soal CPO di Eropa

Minyak sawit merupakan komoditas utama dan penting bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, Pemerintah Indonesia serius dan berkomitmen penuh dalam menerapkan *sustainable palm oil* di Indonesia. Itulah yang ditegaskan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi saat berdialog dengan industri kelapa sawit di Uni Eropa (UE) dan debat di Parlemen Eropa mengenai minyak sawit berkelanjutan (*sustainable palm oil*), 17-18 Maret 2014, di Brussel, Belgia.

"Indonesia sudah memiliki *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), sebagai peraturan pemerintah yang mewajibkan industri dan petani sawit agar memproduksi minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan melalui penerapan sertifikasi," papar Bayu.

Menurutnya, melalui implementasi ISPO, pemerintah menunjukkan dukungan akan pentingnya produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Selain ISPO, masih ada lagi sistem sertifikasi lainnya seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang diterapkan sejak 2004.

Rencananya, Pemerintah akan bekerja sama dengan RSPO

untuk menyusun kesesuaian standar yang dapat dijadikan acuan standar global mengenai minyak sawit berkelanjutan.

Konsumen minyak sawit di Uni Eropa menginginkan minyak sawit yang berkelanjutan karena perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab utama dari deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini diperburuk pula dengan minimnya informasi yang tepat dan pengetahuan masyarakat akan manfaat minyak sawit bagi kesehatan.

"Kita harus dapat memberikan informasi yang akurat untuk menanggapi tuduhan tersebut, sehingga kami menggulirkan gagasan perlunya Indonesia-Uni Eropa melakukan *joint research* di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, memberikan pemahaman dan edukasi kepada industri dan konsumen minyak sawit. Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya melaksanakan *consumer campaign* di negara-negara konsumen utama minyak sawit," imbuh Wamendag.



Raker Kemendag 2014 Tingkatkan Kinerja Perdagangan Nasional

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, mengatakan, Rapat kerja Kemendag 2014 memiliki arti strategis bagi kesiapan sektor perdagangan Indonesia menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam perkembangan perekonomian dunia yang sangat cepat. Raker ini membahas beberapa isu-isu penting, seperti perhatian terhadap peningkatan ekspor stabilisasi harga bahan pokok, konsumen cerdas, diplomasi perdagangan internasional, serta kesiapan Indonesia menuju implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Hal itu dikatakan Mendag M. Lutfi dalam sambutannya pada Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan tahun 2014, Rabu 12 Maret 2014 di Jakarta. Raker tahunan itu mengambil tema "Implementasi UU Perdagangan untuk Mendukung Stabilisasi Harga, Peningkatan Ekspor, Diplomasi Perdagangan, dan Kebijakan Strategis Perdagangan."

Menurut Lutfi, untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia sangat penting dibahas tentang diversifikasi produk ekspor utama dan produk yang prospektif melalui peningkatan nilai tambah, adaptasi produk serta diversifikasi pasar ekspor di beberapa negara potensial melalui program misi pembelian

dan misi dagang ke kawasan Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah; termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui promosi dan 'nation branding'.

"Untuk itu, saya berharap seluruh perwakilan perdagangan di luar negeri memantapkan langkah antisipatif dan taktik melalui *market intelligence* dan promosi yang tepat di masing-masing Negara," jelas Lutfi.

Raker Kemendag tahun 2014 itu, juga diundang para stakeholder untuk berkontribusi memikirkan strategi Kemendag dalam meningkatkan ekspor produk yang bernilai tambah. Di samping itu, Raker Kemendag juga melakukan pembahasan tentang rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bidang perdagangan.

Dan di akhir sambutannya, Mendag M. Lutfi, tak lupa menyampaikan rasa syukur atas disahkannya UU No. 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan. "Dengan adanya UU Perdagangan yang pertama kali setelah 80 tahun, diharapkan dapat memacu kinerja sektor perdagangan nasional dalam pencapaian kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Anggota Bursa Timah BKDI Tak Terindikasi Ekspor Ilegal

Bappebti selaku otoritas bursa timah akan memanggil dan menginvestigasi Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang anggotanya diindikasikan melakukan ekspor timah secara ilegal.

Seperti diberitakan media beberapa waktu lalu, sebanyak 134 kontainer timah asal Provinsi Babel, diamankan aparat penegak hukum di perairan Batam. Timah yang diamankan penegak hukum itu sedianya akan dikirim ke Singapura.

"Kami akan memanggil BKDI dan memperjelas permasalahan tersebut. Jika kelak terindikasi anggota BKDI yang melakukan itu, maka BKDI yang harus mengambil tindakan. Sebab, ketika BKDI menerima anggotanya maka saat itu sudah disebutkan sejumlah persyaratan

yang harus dipenuhi," jelas Kepala Biro Analisis Pasar, Bappebti, Mardjoko, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh dikatakan Mardjoko, Bappebti tidak memiliki kewenangan untuk menindak anggota bursa timah BKDI yang melanggar peraturan. "Jika BKDI menemukan ada anggotanya yang melanggar hukum, maka BKDI yang berwenang untuk mengambil tindakan tegas."

"Tetapi dari informasi sementara yang kami peroleh dari BKDI, tidak ada anggota BKDI yang melakukan pelanggaran ketentuan ekspor timah. Menurut informasi itu, memang di satu kapal tersebut ada banyak timah yang dimiliki sejumlah perusahaan, dan di antara kontainer itu ada timah yang



ilegal. Tetapi timah dari anggota BKDI, *clean and clear*," imbuh Mardjoko. 



Ekspor CPO Maret 2014 Naik 13 %

Ekspor minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya pada bulan Maret lalu tercatat sebanyak 1,79 juta ton, atau mengalami kenaikan 13 % dibandingkan bulan Februari sebanyak 1,58 juta ton. Kenaikan volume ekspor CPO itu disebabkan harga kedelai yang cenderung tinggi, serta stok CPO Indonesia dan Malaysia yang sudah berkurang dan spekulasi El Nino yang mempengaruhi pasar juga masih terus berkembang.

"Kenaikan harga rata-rata kedelai sejak bulan Februari, telah membuat beberapa importir minyak nabati mulai melirik minyak sawit sebagai minyak substitusi," kata Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), beberapa waktu lalu.

Kenaikan permintaan akan CPO yang tercatat sangat signifikan datang dari negara Afrika dan Pakistan meskipun dari sisi volume tidak sebanyak permintaan dari India, China dan Uni Eropa. Ekspor CPO Indonesia dan turunannya ke Pakistan tercatat meningkat dari 58,7 ribu ton pada Februari menjadi 174 ribu ton pada Maret (197 %), sedangkan ekspor ke negara-negara Afrika tercatat meningkat sebesar 59 % dari 79 ribu ton pada Februari menjadi 125,5 ribu ton di bulan Maret. Volume ekspor CPO dan turunannya ke India tercatat meningkat sebesar 31 % dari 313 ribu ton di bulan Februari menjadi sebesar 412 ribu ton di bulan Maret. Sedangkan ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia ke China tidak mengalami kenaikan yang signifikan, ekspor tercatat naik 11 % dari 254 ribu ton pada Februari menjadi 281 ribu ton di Maret.

Ekspor Karet Tertekan Harga Rendah

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut Edy Irwansyah, mengatakan, melemahnya pasar saham Asia otomatis menekan harga karet di pasar global. "Bahkan dalam dua pekan terakhir, harga karet di bursa Singapura terus menunjukkan tren penurunan," katanya baru-baru ini. "Seyogyanya pada kondisi produksi kebun sangat rendah seperti saat ini, seharusnya harga karet naik. Tapi kenyataannya harga komoditas ini terus anjlok bahkan menyentuh angka terendah sejak Februari 2011 di mana harga spot untuk SICOM-TSR20 tercatat US\$ 5,75 per kg," jelas Irwansyah. Dikatakan Irwansyah, kondisi negara-negara Asia Tenggara sebagai produsen karet saat ini sedang mengalami kekeringan yang mengakibatkan produksi menurun. Secara ekonomi, dengan kondisi seperti itu seharusnya harga karet akan naik meski permintaan stagnan.

"Selain itu, pada saat harga minyak mentah meningkat, harga karet alam pun biasanya ikut naik. Tapi harga minyak untuk jenis WTI sudah di atas US\$104 per barrel justru harga karet semakin turun. Memang permintaan dari negara-negara konsumen utama boleh dikatakan stagnan, tapi harga terus turun sejak Februari 2011," ungkapnya.

"Semua ini hanya permainan dari spekulasi di pasar yang ingin mencari keuntungan. Untuk itu, saat ini kami memilih untuk memangkas produksi agar tak merugi hingga harga kembali stabil," papar Irwansyah. Sementara itu, berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) Disperindag Sumut, nilai ekspor karet Sumut pada triwulan I tahun 2014 ini juga menunjukkan penurunan nilai, yakni anjlok 19,9 % menjadi US\$ 138,5 juta dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar US\$ 173,06 juta.

Harga Lada Putih Babel Tinggi Permintaan Ekspor Meningkat

Harga lada putih di tingkat pedagang pengumpul di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), menembus angka Rp 118 ribu per kilogram atau naik dibanding sebelumnya Rp 110 ribu karena permintaan komoditas tersebut meningkat.

"Kenaikan harga lada putih itu dikarenakan permintaan negara tujuan ekspor meningkat, sementara pasokan lada dari petani kurang," kata pedagang pengumpul lada putih Ellan di Pangkal Pinang, akhir Maret lalu.

Ellan menjelaskan kenaikan harga lada putih tidak mempengaruhi transaksi yang masih sepi karena petani belum

memasuki masa panen. Ia juga memperkirakan harga lada putih akan terus mengalami kenaikan karena permintaan pasar nasional dan internasional yang terus meningkat dan tidak sebanding dengan hasil petani yang masih kurang.

"Dalam beberapa tahun terakhir hasil lada putih Babel mengalami penurunan karena minat petani mengembangkan komoditas ini berkurang dan mereka lebih tertarik mengembangkan komoditas lainnya seperti karet, kakao, atau menambang bijih timah karena lebih mudah dan cepat menghasilkan uang," ujar Ellan.



BKDI launched PAMP Gold physical contract

Indonesian commodity and derivative bureau has done another innovation to give an easy way in investment by launching new product of PAMP Gold Physical Contract. For this multilateral contract BKDI has embraced Straits Bullion Pty Ltd as exclusive distributor of PAMP gold in Indonesia and also as physical settlement mechanism place.

This PAMP Gold contract gave 2 option which are PAMPGRID for 100 gram Gold contract in IDR rate and PAMPKGUD for 1 KG gold contract in USD rate. The launching of these 2 contracts were expected as a facility for personal investor or institutional who would like to give investment in small or big scale.

"The launching of PAMPGRID and PAMPKGUD gold contract is a proof of BKDI's commitment for being an available innovated exchanges that keeps introducing new product to provide alternative in investing for Indonesian people," Megain Widjaja, The BKDI's managing director, on PAMP gold physical contract launching in Jakarta couple days ago.

"With the presence of this new gold contract, it is not only retail segment that can invest in gold, but it is expected that the institutional investor such as financial company also can allocate their clients fund on investment through this PAMP gold contract," Megain added.

The PAMP gold contract transaction can be done by all BKDI's member that has Coftra's permit. Moreover, each PAMP gold contract transaction through BKDI will be guaranteed by PT Identrust Security International (ISI) as clearing institution so the transaction that will be done by a secure and trusted retail segment or institutional investors. 📍

The Ministry of commerce Regulation No. 32 will be revised

The Ministry of commerce will revise the Policy No. 32 year 2013 in regards to Tin Export Regulation in near future. The chief of Coftra market analysis Bureau, Mardjoko said that the cause of revision is the large number of deviation on tin solder export from Indonesia after the implementation of Policy NO.32 year 2013.

As we all know, The policy No. 32 year 2013 has established that tin bars and non bar tin has to be traded through Tin Exchange prior to export. For tin bars, it was established on 30th of August 2013 while for non bar tin will be established on 1st of January 2015. Therefore, tin solder which is included in non bars tin category currently can not be included in export mechanism through exchange.

According to Mardjoko, that policy revision was needed in near future to avoid export irregularity. "Nowadays there are founding on tin export in irregular form. That was done to avoid government policy that has declared tin bars trading must go through futures exchange," Mardjoko explained at one event in Jakarta.

"Hence the revision of Policy No. 32 is currently still on discussion stage. We expected the discussion will not take long so it will reduce the leak level on illegal tin export," Mardjoko said. 📍

The Ministry of Commerce targeted 4.1 % export growth in 2014

The Ministry of Commerce targeted 4.1 % export growth in 2014 with the estimation value reaches US\$ 190 billion. On the other hand the non oil export in 2014 has been predicted around 5.5% - 6.5% growth compared with 2013 result with value approximately US\$ 158 Billion – 159 billion.

The Minister of Commerce, M. Lutfi, on his statement to press in Jakarta, said that to reach the target of export growth, Ministry of Commerce has established 5 major strategies on export growth which are promotion, trading security, competency growth with regulation and facilitation, competency growth with down stream and import substitution, and

also competency growth in infrastrucuter.

"Those strategies has been and will be always sincronized and synergized along with relevant authority, whether it is governmental (Ministry / institution) or private (KADIN/GAPINDO/associations as entrepreneurs), whether it is on central or regional level and also including Indonesian representative in overseas," Lutfi said.

According to Minster of Commercet, the export growth target was described on country target of export country destination which will be prioritized on major export and prospective export market.

Those countries that were included

in major market were selected base on biggest value and segment of export market of Indonesian export value to world, with positive trading trend in the past 5 years. For the prospective market group countries were selected based on high export growth value, and incresing value and Indonesia export market segment in those countries with positive trading trend in the last 5 years.

"The export growth in 2014 was done based on the growth of export product target that was divided on major products, prospective product and other non oil products," M. Lutfi said. 📍



PENERBITAN RESI GUDANG BULAN FEBRUARI 2014

NO.	Pengelula Gudang/Gudang	Penerbitan				
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. PERTANI					
	- Probolinggo (Krasan) *	Jagung	4	730	3.500	2.555.000.000
	- Malang *	Beras	1	6,25	8.500	53.125.000
	- Probolinggo (Banyuanyar) *	Jagung	1	225	3.500	787.500.000
		Gabah	2	435	3.500	1.522.500.000
	- Bojonegoro *	Jagung	1	30	3.000	90.000.000
Jumlah		Gabah	2	435	3.500	1.522.500.000
		Jagung	6	985	3.333	3.432.500.000
		Beras	1	6	8.500	53.125.000
Total			9	1.426,25		5.008.125.000

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN FEBRUARI 2014

NO.	Pengelula Gudang/Gudang	Penerbitan			Pembiayaan		
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. PERTANI						
	- Probolinggo (Krasan) *	Jagung	4	2.555.000.000	3	1.355.000.000	Bank Jatim
	- Malang *	Beras	1	53.125.000	1	37.000.000	Bank Jatim
	- Probolinggo (Banyuanyar) *	Jagung	1	787.500.000	1	551.000.000	Bank Jatim
		Gabah	2	1.522.500.000	2	1.065.000.000	Bank Jatim
	- Bojonegoro *	Jagung	1	90.000.000	-	-	-
Jumlah		Gabah	2	1.522.500.000	2	1.065.000.000	
		Jagung	6	3.432.500.000	4	1.906.000.000	
		Beras	1	53.125.000	1	37.000.000	
Total			9	5.008.125.000	7	3.008.000.000	25.548.020.000

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN FEBRUARI 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode Februari 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi Februari 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-Februari 2014 (Rp.)
1.	Sumatra Barat	1.787.415.000	Nihil	1.787.415.000
2.	Jambi	Nihil	Nihil	0
3.	Lampung	Nihil	Nihil	0
4.	Jawa Barat	12.756.125.000	Nihil	12.756.125.000
5.	Jawa tengah	12.407.500.000	14.252.000.000	29.375.000.000
6.	Yogyakarta	11.715.250.000	Nihil	11.715.250.000
7.	Jawa timur	20.785.000.000	22.841.000.000	60.716.400.000
8.	Bali	Nihil	Nihil	0
9.	NTB	Nihil	Nihil	0
10.	Sulawesi Utara	Nihil	Nihil	0
11.	Sulawesi Selatan	Nihil	Nihil	0
12.	Sulawesi Tenggara	4.927.600.000	Nihil	4.927.600.000
13.	Gorontalo	Nihil	Nihil	0
14.	DKI Jakarta (APBD)	Ditutup	Nihil	0
15.	PT iPASAR Indonesia	Nihil	1.334.050.000	0
16.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	0
TOTAL		64.378.890.000	38.427.050.000	121.277.790.000

Sumber: Bappebti

PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE FEBRUARI 2014

Komoditas	Penawaran Februari 2014	Transaksi Januari - Februari 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	1.300.000 Kg	0	0
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	117.000 Kg	0	0
Gondorukem	2.636 Ton	0	0
TOTAL NILAI TRANSAKSI			0

Sumber: PT iPASAR, data diolah



Peran Strategis Bappebti

Pengantar; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan salah satu unit di Kementerian Perdagangan yang memiliki tiga tugas pokok dan fungsi atau dikenal dengan Tupoksi. Tiga Tupoksi Bappebti itu yakni membina, mengawasi dan mengembangkan perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditi agro (PLKA).

Tiga Tupoksi Bappebti itu saling memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dalam koridor meningkatkan daya saing sektor perdagangan Indonesia. Dan pada akhirnya tercipta stabilisasi harga dan penguatan pasar di dalam negeri.

Peran strategis Bappebti mewujudkan penguatan pasar di dalam negeri tampak dari Visi dirumuskan sebagai berikut; "Terwujudnya sektor perdagangan sebagai penggerak utama

peningkatan daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia"

Sedangkan Misinya; 1. Mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebagai sarana pengelolaan risiko harga atau lindung nilai dan terbentuknya harga yang transparan yang dapat dijadikan sebagai referensi harga; 2. Mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana alternatif pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku usaha terutama petani dan UKM; 3. Mengembangkan Pasar Lelang (PL) Komoditi Agro sebagai sarana terbentuknya harga yang transparan dan terbuka serta akses pemasaran produk komoditi primer.

Dalam kaitan itu, arah kebijakan Bappebti untuk tiga Tupoksi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut;





Arah Kebijakan

Perdagangan Berjangka

- Penyusunan atas perubahan PP No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan PBK;
- Penyusunan Juknis atas Perubahan PP No.9 Tahun 1999 termasuk di dalamnya sanksi dalam rangka Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum di Bidang PBK;
- Peningkatan penegakan hukum;
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum dan instansi terkait;
- Pembinaan kepada seluruh Stakeholder terkait (Bursa, Kliring, Pialang dan Pedagang Berjangka);
- Optimalisasi pengawasan PBK baik harian maupun bulanan, untuk menjaga integritas pasar;
- Monitoring terhadap pengawasan Direktorat Kepatuhan Pialang Berjangka;
- Optimalisasi pengawasan untuk menjaga integritas keuangan melalui audit rutin, audit sewaktu-waktu dan audit khusus serta evaluasi atas laporan keuangan pelaku usaha;
- Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di bidang PBK;
- Penguatan dan pengembangan organisasi Bappebti.

Arah Kebijakan

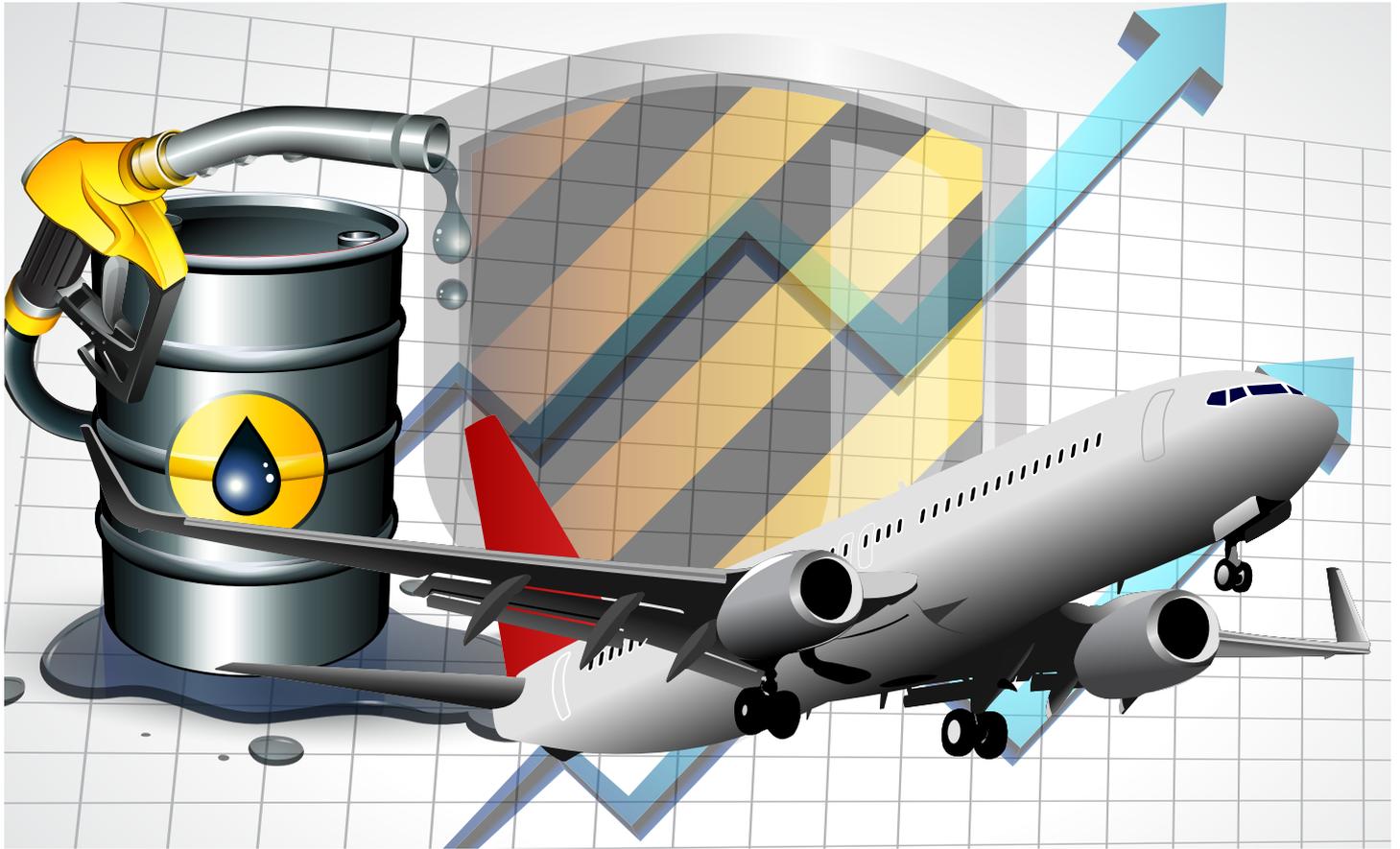
Sistem Resi gudang

- Amandemen PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006;
- Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang;
- Sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha SRG;
- Membangun Gudang di wilayah sentra produksi dan distribusi komoditi;
- Pembentukan Tim Pokja SRG dengan melibatkan Instansi/Lembaga terkait;
- Pembentukan Badan Pengawas SRG sesuai amanat UU No.9 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.9 Tahun 2006.

Arah Kebijakan Revitalisasi Pasar Lelang

Pasar Lelang

- Revitalisasi Pasar Lelang akan diterapkan di seluruh Dinas penyelenggara Pasar Lelang
- Dana Dekonsentrasi akan difokuskan untuk pembinaan dan pengawasan Pasar Lelang
- Tiap penyelenggara memiliki Komoditi Unggulan sesuai standar yang terkait dengan PBK dan SRG
- Memiliki Sistem Informasi Terintegrasi secara online
- Memiliki Sistem Penjaminan Transaksi
- Memiliki dokumen baku (PTT, SOP, bisnis plan, kontrak perjanjian, dll)
- Terdapat peraturan dan kebijakan di PBK, SRG dan PL yang saling bersinergi



*) Adrian Zenggi

Manajemen Risiko Hedging BBM

Manajemen risiko ini menggambarkan proses yang digunakan oleh perusahaan, pemerintah, dan lembaga-lembaga keuangan untuk mengurangi eksposur mereka terhadap pergerakan harga minyak. Contoh klasik adalah kegiatan sebuah perusahaan penerbangan, konsumsi bahan bakar jet mewakili sampai 23 % dari semua biaya.

Maskapai penerbangan berusaha untuk melindungi diri dari kenaikan harga bahan bakar jet di masa depan. Untuk melakukan ini, pembelian *swap* atau *call option* terkait dengan pasar bahan bakar jet dari lembaga siap untuk membuat harga di instrumen ini. Berikutnya setiap kenaikan harga jet untuk periode

dilindungi oleh transaksi derivatif. Maskapai penerbangan berusaha untuk melindungi diri dari kenaikan harga bahan bakar jet di masa depan. Untuk melakukan ini, pembelian *swap* atau *call option* terkait dengan pasar bahan bakar jet dari instrumen ini. Sebuah serah terima tunai di berakhirnya kontrak akan mendanai kerugian finansial yang ditanggung oleh setiap kenaikan bahan bakar jet fisik.

Fuel Hedging adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh beberapa maskapai penerbangan dalam menstabilkan biaya bahan bakar jet. Sebuah maskapai penerbangan melakukan kontrak hedge bahan bakar untuk membayar pembelian bahan bakar jet di masa depan dengan

harga yang ditentukan. Maskapai penerbangan melakukan *Fuel Hedge* ke dalam kontrak berjangka karena sebagian bertaruh bahwa harga bahan bakar jet di masa depan akan lebih tinggi daripada harga sekarang atau untuk mengurangi menghadapi gejolak biaya di masa depan yang tidak diketahui.

Biaya lindung nilai (*hedge*) bahan bakar tergantung pada masa depan harga bahan bakar yang diperkirakan.

Airlines dapat menempatkan hedge baik berdasarkan harga masa depan bahan bakar jet atau pada harga masa depan minyak. Karena minyak mentah adalah sumber bahan bakar jet, harga minyak mentah dan bahan bakar jet biasanya berkorelasi. Namun, faktor-



faktor lain (seperti kesulitan mengenai kilang kapasitas) dapat menyebabkan perbedaan yang luar biasa dalam tren minyak mentah dan bahan bakar jet.

Sebuah perusahaan yang tidak melakukan lindung nilai (hedge) bahan bakar umumnya percaya hal-hal berikut ini:

1. Perusahaan memiliki kemampuan untuk setiap kenaikan harga bahan bakar tanpa dampak negatif pada margin keuntungan mereka.

2. Perusahaan ini yakin bahwa harga bahan bakar akan jatuh dan nyaman membayar harga yang lebih tinggi untuk bahan bakar jika pada kenyataannya, analisis mereka terbukti tidak benar.

Manajemen risiko harga bahan bakar adalah praktek menciptakan nilai ekonomi dalam suatu organisasi dengan mengelola eksposur risiko harga bahan bakar. Sebuah spesialisasi kedua manajemen risiko keuangan dan analisis harga minyak - dan mirip dengan praktek manajemen risiko konvensional - manajemen risiko harga bahan bakar merupakan proses siklus terus-menerus yang meliputi penilaian risiko, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kontrol risiko. Manajemen risiko harga bahan bakar berfokus terutama pada kapan dan bagaimana sebuah organisasi dapat dengan baik melakukan hedge terhadap eksposur risiko harga bahan bakar yang mahal. Manajemen risiko harga bahan bakar umumnya disebut sebagai *bunker hedging* dalam konteks dan pengiriman lindung nilai bahan bakar dalam konteks penerbangan.

Siapa yang menggunakan manajemen risiko harga BBM, dan mengapa?

Manajemen risiko harga bahan bakar ini paling sering dilakukan dalam bisnis di mana account biaya bahan bakar untuk proporsi yang cukup besar dari biaya operasional. Kapal pengangkut

(di mana 50-60 % dari biaya operasi mungkin berhubungan dengan bahan bakar), penerbangan (sekitar 35 % dari biaya operasional), Usaha intensif pemasok minyak, dan bahan bakar-dalam industri sering menggunakan strategi ini untuk mengurangi dampak dari volatilitas harga minyak. Biasanya, maskapai akan melakukan lindung nilai (hedge) hanya bagian tertentu dari kebutuhan bahan bakar mereka untuk jangka waktu tertentu.

Southwest melakukan lindung nilai (hedge) porsi yang lebih besar dari kebutuhan bahan bakar Penerbangan domestik AS lainnya. Agresif *Southwest* melakukan lindung nilai (hedge) bahan bakar telah membantu maskapai menghindari beberapa rasa sakit akibat kemerosotan industri penerbangan belakangan ini yang dihasilkan dari biaya bahan bakar tinggi. Antara 1999 dan 2008, *Southwest* hemat sekitar US\$ 3,5 miliar melalui lindung nilai (hedge) bahan bakar.

3 Alasan Hedging BBM

Bagi perusahaan yang sehari-harinya menggunakan BBM sebagai kebutuhan pokok setidaknya memiliki tiga alasan utama untuk melakukan lindung nilai- hedging, yakni;

1. Anggaran dan atau profit margin lindung nilai (hedge)

2. Stabilitas kas dan suplai harga, dan

3. Keunggulan kompetitif dari reaksi cepat terhadap perubahan harga pasar.

Efektif manajemen risiko harga bahan bakar membutuhkan kombinasi keuangan dan pasar minyak

keahlian, bersama-sama dengan analisis konstan pergerakan harga minyak di pasar komoditas.

Karena begitu sedikit organisasi memiliki sumber daya untuk mendukung spesialisasi seperti itu, keahlian manajemen risiko harga BBM seringkali dari sumber eksternal.

bakar untuk manajemen risiko

Harga bahan bakar predominantly untuk layanan Manajemen risiko disediakan oleh tim spesialis dalam perusahaan minyak dan bursa dunia:

1. Perusahaan minyak -- Total S.A., Royal Shell Belanda, ExxonMobil

2. Bursa dunia – NYMEX, TOCOM
Untuk pasar energi tersebut diperdagangkan di New York NYMEX, Di Tokyo TOCOM dan on-line melalui Intercontinental Exchange. Futures Contract adalah suatu kontrak berjangka untuk mengirimkan atau menerima minyak pada tempat yang ditetapkan di masa depan.

Harga bahan bakar dalam proses manajemen risiko

Mirip dengan praktik manajemen risiko konvensional, Manajemen risiko harga BBM dianggap sebagai proses siklus terus-menerus yang meliputi berikut ini:

• Menetapkan konteks

o saat ini dan masa depan lingkungan bisnis

o posisi keuangan dan anggaran

o tujuan dan kebutuhan

o konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan, dll

• Penilaian risiko

o perhitungan biaya bahan bakar

o identifikasi risiko

o sikap organisasi risiko

o analisis eksposur fluktuasi harga bahan bakar

o skenario berbagai strategi lindung nilai

• Risiko perawatan

o pelaksanaan strategi risiko harga bahan bakar

• Memonitor dan mengkaji ulang.

*) *Praktisi PBK*

Penyedia harga bahan



Kepincuk SRG Kopi

Berhasil mengelola gudang SRG komoditi gabah dan beras ketan, Hetty Yohety mengincar komoditas kopi di wilayah Subang untuk diresigudangkan.



Hetty Yohety

Dapat menjadi pengelola gudang Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan suatu kebanggaan. Pasalnya, SRG telah terbukti menjadi salah satu sektor bisnis yang menjanjikan. Selain pengelola gudang mendapatkan keuntungan dari jasa pelayanan yang diberikan, sisi lainnya, instrumen ini bermanfaat bagi petani sebagai upaya mendapatkan harga terbaik.

Hal itulah yang dapat ditangkap dari penuturan Hetty Yohety, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Annisa, Maret 2014 lalu. Dia mengatakan, KSU Annisa yang terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jabar ini, telah resmi mendapatkan izin sebagai

pengelola gudang dari Bappebti pada 29 September 2013 lalu.

Dengan izin tersebut, Ety, begitu dia akrab disapa, bersyukur KSU Annisa kini dapat mengelola gudang SRG di Subang untuk komoditas beras terutama beras ketan. Jika merujuk ke belakang, sejak tahun 2010 gudang SRG ini sudah berdiri atas bantuan Pemerintah Pusat melalui Bappebti. Namun, karena masih minimnya sosialisasi tentang SRG bagi kalangan petani, maka saat itu sarana tersebut belum maksimal dimanfaatkan.

Tapi kini, kata Ety, para petani sangat antusias untuk memanfaatkan keberadaan gudang SRG tersebut. "Petani beras ketan sangat diuntungkan dengan adanya gudang ini. Harga

beras ketan terus mengalami kenaikan, sekarang berada di kisaran Rp1.200.000/ton," tuturnya.

Secara akumulatif hingga Maret 2014, beras ketan yang tersimpan sekitar 300 ton dengan jumlah Resi Gudang yang diterbitkan mencapai 21 resi. "Sampai Agustus mendatang, kami perkirakan beras ketan yang tersimpan bisa mencapai 1.000 ton," ucapnya.

Selain komoditi beras, Ety juga memiliki wacana untuk menggarap komoditi kopi untuk wilayah Subang. Wacana itu muncul karena dorongan dari 7 kelompok tani kopi sekitar yang membutuhkan skema SRG. Karenanya, saat ini Ety berusaha untuk mendapatkan gudang yang dapat menampung sekitar

“Sejak saya mengenal SRG ini, dalam hati saya langsung berkata bahwa inilah instrumen yang dapat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraannya”



100-200 ton kopi. “Sekarang harga kopi tidak menentu (fluktuasi-Red). Dengan adanya gudang SRG kopi, maka eksportir tidak perlu susah, karena dapat mencari kopi di gudang,” kata wanita kelahiran Subang, Agustus 1975 ini.

Jatuh Cinta

Mengenal instrumen Sistem Resi Gudang (SRG) di tahun 2007 sebagai alternatif pembiayaan pasca panen bagi kalangan petani, Ety, langsung jatuh hati menekuni mekanisme pembiayaan ini. Berbagai informasi pun dicoba dikumpulkannya, baik melalui instansi terkait maupun mengikuti berbagai sosialisasi untuk lebih jauh memahami manfaat dan keuntungannya. “Sejak saya mengenal SRG ini, dalam hati saya langsung berkata bahwa inilah instrumen yang dapat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.

Ibu dari tiga puteri dan satu putera ini, mengaku, menggeluti bisnis perberasan sudah dilakoni sejak masih duduk dibang-

ku SLTA. Hal itu dikarenakan mengikuti bisnis orang tuanya yang menjadi salah satu pemasok beras Dolog Subang.

“Saya selalu dilibatkan ayah untuk membantunya ketika tiba musim pengadaan beras Dolog. Maklum, saya anak tunggal. Sehingga pengalaman itulah yang membuat saya sampai saat ini menekuni bisnis perberasan,” demikian dikatakan anak dari pasangan H. Tamad Mochtar dan Hj. Siti Nur Rochmah.

Meski sudah merasa mapan dalam bisnis beras, Ety, tetap berupaya mengejar cita-citanya di jalur formal. Untuk menggapai cita-citanya itu, dia pun melanjutkan pendidikannya dari tahun 2006 di Fakultas Hukum, Universitas Subang. “Di bulan November 2011, lalu, saya sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah. Dan saat ini saya sudah mengantongi gelar Sarjana Hukum Perdata. Rencananya pada bulan Januari

2012, saya akan diwisuda.”

“Sebenarnya sejak remaja saya bercita-cita menjadi seorang notaris. Tetapi karena terlanjur dipinang akhirnya tertunda melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, setelah diwisuda nanti, saya akan melanjutkan pendidikan notaris. Kemungkinan saya akan memilih Unpad atau UI,” kenangnya.

Menurut Ety, dipilihnya pendidikan di bidang hukum karena masih sangat banyak masyarakat khususnya di daerah yang tidak mengerti hukum dan peraturan. Hal itu berdampak pada seringnya masyarakat alami kerugian besar. Pada hal, aspek-aspek hukum itu selalu ada di sekitar kita, baik dalam bisnis maupun kemasyarakatan. “jadi, seorang pebisnis pun harus mengerti hukum dan peraturan,” tandas Hetty Yoheti. ☺



“Manfaatkan SRG
dan
Tingkatkan Kesejahteraan”